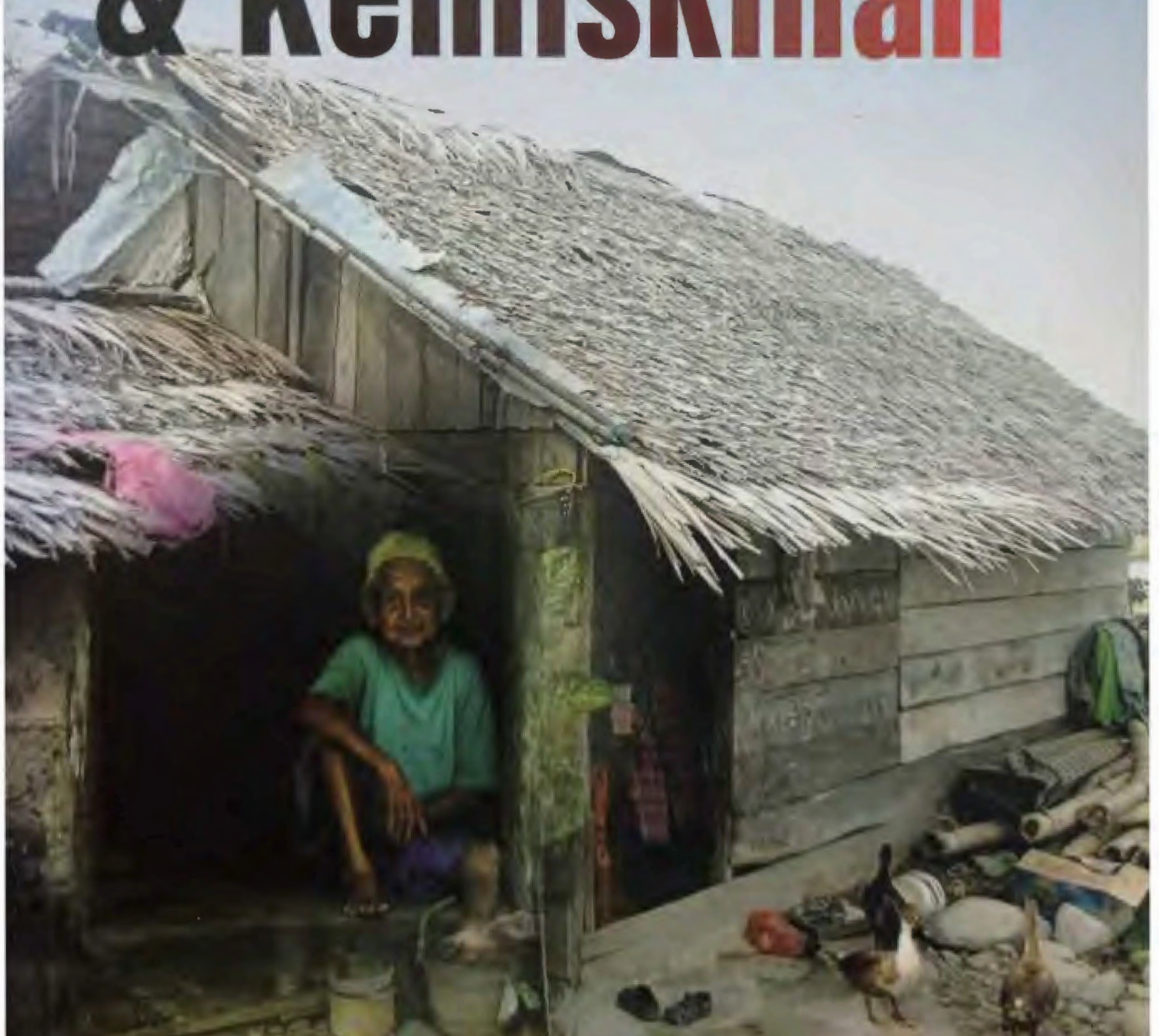


Editor:

Mutiullah dan Moch Nur Ichwan

Agama, Filsafat, & Kemiskinan



Editor:
Mutiullah dan Moch Nur Ichwan

Agama, Filsafat, & Kemiskinan

Agama Filsafat & Kemiskinan

Perpustakaan Nasional:

Katalog dalam Terbitan (KDT)

Mutiullah dan Moch Nur Ichwan (ed.)

Agama, Filasafat, dan Kemiskinan, Editor: Mutiullah dan Moch Nur Ichwan, — cet. 1. — Yogyakarta: Program Studi Agama dan Filsafat Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2015
xii + 252 hlm, 16 cm x 24 cm

ISBN: 978 - 6027 - 2084 - 3 - 8

I. Antologi

2. **Agama, Filasafat, dan Kemiskinan**

I. Judul

II. Mutiullah dan Moch Nur Ichwan (ed.)

@ Hak cipta Dilindungi oleh undang-undang

Memfotocopy atau memperbanyak dengan cara apapun sebagian atau seluruhnya isi buku ini tanpa seijin penerbit adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum

Agama, Filasafat, dan Kemiskinan

Editor: Mutiullah dan Moch Nur Ichwan

Penulis:

Moch Nur Ichwan – Mutiullah – Alim Roswanto
Martino Sardi – Benny Baskara – Muhammad Arif
Musahadi – Ishak Hariyanto – Mahathir Muhammad Iqbal
Benny Afwadzi – Muhammad Barir – Mu'ammam Zayn Qadafy

Cetakan I: Maret 2015

Diterbitkan oleh:

Program Studi Agama dan Filsafat
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Jl. Marsda Adisucipto Yogyakarta 55281
Telp. 0274 519709, Faks. 0274 557978
Website <http://pps.uin-suka.ac.id>
E-Mail: pps@uin-suka.ac.id

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	v
Daftar Isi.....	xi

BAGIAN I: AGAMA DAN KEMISKINAN

- KEMISKINAN DI NEGERI MAKMUR: AKAR, KEBIJAKAN, DAN TANTANGAN
Oleh: Musahadi 3
- AGAMA, KEMISKINAN DAN PERDAMAIAN
Oleh: Martino Sardi 23
- AGAMA SEBAGAI BAYANG-BAYANG SOLUSI KEMISKINAN
Oleh: Ishak Hariyanto 37

BAGIAN II: FILSAFAT DAN KEMISKINAN

- AGENDA BUMI HANGUS KEMISKINAN DALAM BINGKAI TEORI KEADILAN JOHN RAWLS
Oleh: Mutiullah 57
- RICHARD RORTY DAN KEMISKINANPOLITIK DALAM ISLAM
Oleh: Alim Roswanto. 77

- KRITISISME KANT, TEOLOGI ISLAM DAN KEMISKINAN
Oleh: Muhammad Arif 107
- APA KATA FILSAFAT TENTANG KEMISKINAN? MENDAKI
PUNCAK PEMIKIRAN KARL MARX, MAX WEBER, DAN HASSAN
HANAFI
Oleh: Benny Baskara 125

BAGIAN III: ISLAM, SPIRITUALITAS DAN KEMISKINAN

- MEMBANGUN KEBERISLAMAN PRO POOR
Oleh: Mahathir Muhammad Iqbal 151
- KEMISKINAN DAN PESAN PROFETIK: UPAYA MENGGALI PESAN
TERSIRAT DALAM HADIS NABI
Oleh: Benny Afwadzi 167
- KESADARAN ASKETIS DAN PENGENTASAN KEMISKINAN
Oleh: Muhammad Barir 189
- PARADIGMA ASKETISME PROGRESIF DAN MEDAN PERANG
KEMISKINAN
Oleh: Mu'ammarr Zayn Qadafy 207
- ISLAM, KEMISKINAN DAN AKTIVISME SOSIAL KRITIS
Oleh: Moch Nur Ichwan 223
- BIODATA PENULIS 245



Moch Nur Ichwan

ISLAM, KEMISKINAN, DAN AKTIVISME SOSIAL KRITIS

Agama dapat mendorong kepada kemakmuran, tapi juga dapat mendorong kepada kemiskinan—sebagaimana ia dapat mendorong kepada perdamaian, tapi juga dapat mendorong kepada konflik dan pertumpahan darah. Tentu agama di sini adalah agama yang ada dalam angan, pemahaman, pemikiran dan kehidupan pemeluknya. Tapi tak dapat dipungkiri bahwa ada teks-teks fundamental keagamaan, kitab suci, yang dapat dipahami secara paradoksikal seperti itu, terutama jika dilepaskan dari konteks dan semangat dasarnya. Pemeluk agama memahami teks-teks itu berdasarkan pengalaman hidup, pengetahuan, prasangka, asumsi, dan kelas sosial mereka. Teks-teks tertentu mungkin dipahami oleh seseorang atau kelompok sebagai mendukung kemiskinan sebagai perilaku religious yang ideal, walau teks-teks serupa dapat dipahami sebagai berbeda oleh seseorang oleh kelompok lainnya. Fenomena kemiskinan di kalangan individu dan masyarakat beragama bukanlah fenomena yang sederhana

yang dengan mudah disimpulkan kemunculannya karena faktor agama. Tetapi, faktor agama atau pemahaman keagamaan dalam menyumbang kepada kemiskinan juga tidak dapat diabaikan.

Artikel ini mengasumsikan bahwa dalam konteks individu dan masyarakat yang religius kemiskinan dan kemakmuran bukan hanya berkaitan dengan pemahaman keagamaan, tetapi juga dengan salah satu atau lebih faktor-faktor psikologis, kultural, dan politik ekonomi (struktural)—tergantung pada konteks individu atau komunitas miskin itu.¹ Namun, tanpa bersasumsi menjawab semua masalah secara komprehensif, artikel ini hanya akan melihat faktor keagamaan dalam fenomena kemiskinan ini, dan melihat pula bagaimana agama juga mempunyai perspektif liberatif yang bertujuan untuk memberantas kemiskinan dan memberdayakan orang-orang miskin, dan bagaimana perseptif liberatif itu terinstitusionalisasi dalam aktivisme sosial kritis.

A. Agama dan Kemiskinan

Sebuah lembaga survei publik yang berpusat di Amerika Serikat, Gallup, melakukan survei pendapat publik di 114 negara pada 2009. Survei ini menunjukkan bahwa agama mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat di banyak negara. Orang dewasa yang disurvei yang mengatakan agama mempunyai peran penting dalam kehidupan mereka sebanyak 84%,² dan sepuluh negara sedikitnya 98% menjawab agama penting dalam kehidupan mereka. Kesepuluh negara itu adalah Bangladesh (99%+), Niger (99%+), Yaman (99%), Indonesia (99%), Malawi (99%), Sri Lanka (99%), Somalia (98%), Djibouti (98%), Mauritania (98%),

¹ Ada beberapa teori yang biasanya dipergunakan untuk menjelaskan tentang fenomena kemiskinan, seperti teori individualistik, budaya kemiskinan, geografi kemiskinan, dan lingkaran kemiskinan (*cycle of poverty*). Semuanya dapat menjelaskan fenomena kemiskinan dengan caranya masing-masing, dan sesuai dengan konteks penelitiannya. Abdul-Mumin Abdulai & Elmira Shamshiry, *Linking Sustainable Livelihoods to Natural Resources and Governance, The Scale of Poverty in the Muslim World*, (Singapore etc.: Springer, 2014).

² Pada tahun-tahun 2006, 2007, and 2008, survei pendapat public Gallup di 143 menunjukkan 82% menjawab agama penting bagi kehidupan mereka. <http://www.gallup.com/poll/114211/Alabamians-Iranians-Common.aspx>; diakses 1 November 2014.

dan Burundi (98%). Namun, negara-negara yang masyarakatnya religius (jika ukuran religiositas itu diukur dari klaim pentingnya agama dalam kehidupan mereka) itu semuanya secara ekstrem miskin. Negara-negara yang masyarakatnya religius (87%/44%) GDP per-kapitanya justru hanya \$2000 ke bawah, sedangkan negara-negara yang masyarakat religiusnya 47% ke bawah, GDP per-kapitanya \$ 25.000 ke atas.³ Karena hasil penelitian itulah, Gallup lalu mengambil kesimpulan bahwa semakin religius bangsa, semakin miskin mereka.

Mungkin masih ada problem metodologis sekitar penelitian Gallup ini, seperti bahwa survei ini misalnya meminta responden untuk menjawab pertanyaan "Apakah agama penting dalam kehidupanmu?" Pertama, religiositas tidak dapat dinilai dari klaim semata yang diungkapkan dalam survey, tapi mestinya dilihat pada nilai-nilai keagamaan yang lebih fundamental yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari mereka. Kedua, "agama" tidaklah mempunyai pemahaman tunggal dan esensialistik, dan oleh karenanya agama yang bagaimana yang dianggap penting bagi kehidupan seseorang masih memerlukan pelacakan lebih dalam. Ketiga, jika yang dimaksud adalah "religiositas" sekalipun, survey ini problematik, karena religiositas mempunyai sejumlah dimensi, yaitu, jika merujuk kepada Glock dan Stark) religiositas experiensial, ritualistik, ideologis, intelektual, dan konsekuensial.⁴ Keempat, mengukur kemiskinan dengan agama dan mengambil kesimpulan bahwa semakin religius sebuah negara semakin miskin, tidaklah *justified*, karena ada faktor-faktor lain yang mempengaruhi fenomena kemiskinan itu, seperti faktor psikologis, budaya, geografi, bencana (alam dan social) dan kebijakan negara. Namun, bagaimana pun juga survey ini, sebagai salah satu prosedur ilmiah, cukup membantu bagaimana agama berperan dalam mempengaruhi cara berpikir masyarakat terhadap kemiskinan.

³ "Religiosity Highest in World's Poorest Nations," <http://www.gallup.com/poll/142727/religiosity-highest-world-poorest-nations.aspx>; diakses 1 November 2014.

⁴ C.Y. Glock dan R. Stark, *Religion and Society in Tension*, (San Francisco: Rand McNally, 1965).

Ada juga perkembangan menggembirakan dalam beberapa tahun terakhir. Ada beberapa negara Muslim (majoritas Muslim) yang telah masuk dalam kategori negara “kaya” dengan *GDP per-kapita 2014* tinggi, seperti Qatar (ke-1), Brunei Darussalam (ke-4), Kuwait (ke-5), UAE (ke-7), Saudi Arabia (ke-11). Tapi berdasar *GDP 2014*, tak ada satu pun negara itu masuk sebagai negara terkaya. Indonesia yang tidak masuk dalam *GDP per-kapita 2014* tinggi malah masuk dalam ranking kesembilan.⁵ Namun, “kaya” di sini bukan berarti “makmur”. Lima negara *GDP per-kapita 2014* di atas mendasarkan diri pada industri minyak, yang itu energi yang tidak terbarukan, yang mempunyai keterbatasan. Kaum miskin di negara-negara ini masih sangat tinggi, kecuali Brunei Darussalam—itupun karena bantuan negara, bukan karena produktivitas rakyat.⁶ Capaian negara-negara ini dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi juga masih rendah.

Meskipun demikian, tak dapat dipungkiri bahwa bahwa negara-negara majoritas Muslim sebagian besar masuk dalam kategori miskin. Kesepuluh negara terreligius yang sekaligus termiskin versi Gallup di atas, sebagian besar adalah negara majoritas Muslim di atas 88%, bahkan hampir 100% Muslim, kecuali Burundi (2.2%), Malawi (12.8%), dan Sri Lanka (8.5%). Jumlah Muslim Bangladesh (90.4%), Niger (98.3%), Yemen (99.0%), Indonesia (88.1), Somalia (98.6), Djibouti (97.0%), dan Mauritania (99.2%).⁷ Ini bukan berarti bahwa “Islam” lah penyebabnya, karena Burundi mayoritas Katolik (62%), Malawi mayoritas Protestan (60%), dan Sri Lanka mayoritas Buddha (70%), juga masuk 10 negara termiskin. Di ketiga negara terakhir ini Katilisme, Protestantisme dan Buddhisme juga tidak mampu mengangkat masyarakat dari kemiskinan.⁸

⁵ <http://www.worldsrichestcountries.com/>; diakses 1 November 2014.

⁶ Azlan Othman, “Government assistance keeps poverty rate down,” *Borneo Bulletin*, 28 September 2014, <http://borneobulletin.com.bn/government-assistance-keeps-poverty-rate/>; diakses 1 November 2014.

⁷ Prosentase berdasarkan atas survey PEW. “Table: Muslim Population by Country”, Pew Research Center, <http://www.pewforum.org/2011/01/27/table-muslim-population-by-country/>; diakses 1 November 2014.

⁸ Arvind Sharma, “Hinduism and Poverty,” dalam William A. Galston and Peter H. Hoffenberg (ed.), *Poverty and Morality, Religious and Secular Perspectives*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, pp. 160-179.

Menurut catatan Organisasi Konferensi Islam (OKI), kendatipun memiliki 70 persen sumberdaya energi dunia dan 40 persen sumberdaya alam, *gross domestic product* (GDP) semua negara anggota OKI masih lebih kecil dibandingkan GDP Jepang.⁹ Selain itu, dalam 60 negara termiskin dunia, hidup 60 persen Dunia Islam, dan 75 persen pengungsi dunia berasal dari negara-negara Muslim. Dengan demikian, lebih dari separuh penduduk miskin dunia adalah Muslim.¹⁰

Ini memang bukan hanya khas Islam. Dalam penelitiannya tentang kaum Protestan konservatif di Amerika, Lisa A. Keister menjelaskan bagaimana agama berpengaruh terhadap kekayaan dengan mempelajari akumulasi asset dari orang-orang Protestan konservatif. Dia telah menunjukkan bahwa Protestan konservatif memiliki kekayaan yang rendah, apapun latar-belakang keluarganya, dan bahwa pendidikan yang rendah, pernikahan dini, keluarga yang besar, dan sedikitnya kekuatan partisipasi perempuan yang bekerja turut menyumbang bagi kemiskinan ini.¹¹ Kebanyakan ciri-ciri masyarakat miskin, termasuk dalam Islam, kurang lebih sama: pendidikan yang rendah, pernikahan dini, keluarga yang besar, dan sedikitnya kekuatan partisipasi perempuan yang bekerja. Dampak dari pendidikan yang rendah, orang cenderung menikahkan anak mereka dalam usia yang sangat muda, agar mereka segera terlepas dari beban menanggung biaya hidup sang anak, atau setidaknya tenaga kerja bertambah satu orang. Keluarga besar adalah logika sederhana untuk mendapatkan banyak tenaga kerja yang dapat menanggung beban hidup secara bersama. Ini tak jarang didukung oleh teologi pemiskinan yang menciptakan tembok kokoh dalam kesadaran yang sulit ditembus untuk dapat mencapai kesejahteraan dan kemakmuran.

⁹<http://tribune.com.pk/story/563435/gdp-40pc-of-muslim-states-population-fall-below-poverty-line/>; diakses 1 November 2014.

¹⁰<http://www.30-days.net/islam/issues/poor-needy/>; diakses 2 November 2014.

¹¹ Lisa A. Keister, "Conservative Protestants and Wealth: How Religion Perpetuates Asset Poverty," *American Journal of Sociology*, Vol. 113, No. 5 (Maret 2008), pp. 1237-1271.

B. Budaya Pemiskinan

Sebelum mengenal agama, seseorang sadar atau tidak telah dibentuk oleh kebudayaannya. Teori struktural-konsensus dalam sosiologi memandang perilaku manusia sebagai perilaku yang dipelajari dari budaya yang melingkupinya. Manusia mempelajari itu melalui sosialisasi. Seorang anak mempelajari aturan-aturan budaya dan sosial dari masyarakatnya.¹² Dia belajar bagaimana menjadi anggota keluarga dan kemudian anggota masyarakat dari keluarganya dan kemudian dari masyarakat di sekitarnya. Seseorang belajar bagaimana makan yang baik, menyapa yang sopan, bersikap kepada yang lebih tua, dan sebagainya, dari masyarakat di mana dia hidup. Nah, dalam konteks kemiskinan, budaya mempunyai andil juga dalam menciptakannya.

Budaya mengajarkan kepada manusia di dalamnya tentang bagaimana melihat alam, masyarakat dan dirinya sendiri, termasuk bagaimana melihat masalah kemiskinan. Pengetahuan lokal, termasuk kearifan lokal, mengajarkan bagaimana orang miskin, atau kaya, menempatkan diri dan bersikap dalam masyarakat. Pemahaman mereka tentang kemiskinan tentu saja dipengaruhi pula oleh etos kerja dan budaya kerja mereka. Di Jawa, misalnya, dikenal pepatah: "Mangan ora mangan ngumpul" (Makan atau tidak makan, yang penting berkumpul), atau "Alon-alon waton kelakon" (Pelan-pelan saja, yang penting sampai). Dalam suatu masyarakat yang etos kerjanya rendah, kemiskinan mungkin dipandang sebagai kondisi yang biasa-biasa saja. Sedangkan dalam masyarakat yang mempunyai etos kerjanya tinggi, kemiskinan dipandang sebagai kondisi buruk yang harus diatasi dengan kerja keras dan cerdas.

Budaya pemiskinan yang melilit turun-temurun, lokasi tempat tinggal yang tidak strategis dan tidak mendukung peningkatan ekonomi, dan mungkin juga bencana alam dan sosial dapat menghancurkan harta-benda dan mengubah orang-orang kaya sekalipun menjadi miskin, dan yang miskin menjadi makin miskin, dapat melahirkan tafsir keagamaan yang melanggengkan

¹² Pim Jones, *Pengantar Teori-teori Sosial*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin. (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010), 8-11.

kemiskinan. Tak dipungkiri adanya kemungkinan pengaruh kebudayaan dalam pemahaman teologis umat beragama semacam ini. Hal ini ditandai dengan kenyataan bahwa ekspresi keislaman berbeda dari budaya satu ke budaya lainnya. Islam Jawa, Sunda, Bugis, Lombok, Minangkabau, Aceh mempunyai perbedaan-perbedaan. Termasuk juga organisasi Islam yang sama dapat mempunyai variasi pengetahuan dan ideologis dari daerah ke daerah. Misalnya, Muhammadiyah Yogyakarta berbeda dari Muhammadiyah Jawa Timur dan Minangkabau. Nahdlatul Ulama (NU) Jawa Timur berbeda dari NU Sunda, Banjarmasin, dan Aceh. Kemiskinan di berbagai negara Muslim tak dapat dipisahkan dari aspek budaya setempat, walau terkadang pula budaya setempat itu sudah bersistesis dengan paham keagamaan atau teologis tertentu yang merembes di dalamnya.

C. Politik Ekonomi Pemiskinan

Faktor eksternal lain yang menyebabkan masyarakat miskin adalah politik ekonomi yang melibatkan kebijakan negara dalam mempunyai dampak makro dalam pemiskinan dan pelemahan rakyat. Artinya, pemahaman teologis yang melemahkan dan memiskinkan (Teologi Pemiskinan) akan dapat berubah atau setidaknya tidak terlalu berdampak melemahkan, jika politik ekonomi pemerintah bersifat anti-kemiskinan—memberdayakan, menguatkan dan memakmurkan. Sebaliknya, pemahaman teologis semacam itu dapat semakin melemahkan jika politik ekonomi pemerintah adalah anti-orang miskin. Ada dua macam kebijakan terkait dengan penanggulangan kemiskinan, yakni kebijakan “anti-kemiskinan” (*anti-poverty policy*) dan kebijakan “anti-orang miskin” (*anti-poor policy*). Kebijakan anti-kemiskinan berupaya menghilangkan kemiskinan dengan upaya-upaya yang berpihak kepada orang miskin, sementara kebijakan anti-orang miskin adalah kebijakan yang tidak mempertimbangkan rakyat miskin dan bahkan justru meminggirkan dan menindas mereka. Kebijakan anti-orang miskin inilah kebijakan yang melemahkan, yang menjadikan rakyat menjadi *mustadh'afun*, dimiskinkan secara struktural. Banyak kebijakan yang mengejar laju pertumbuhan ekonomi tidak memasukkan rakyat miskin

dalam pertimbangan perumusannya. Yang dipikirkan oleh para penentu kebijakan ekonomi hanyalah bahwa perekonomian akan maju jika didukung oleh para pemodal besar, dan bahkan raksasa, tanpa mempertimbangkan apakah itu bermanfaat bagi rakyat miskin dalam mengentaskan mereka dari kemiskinan.

Indonesia pernah mengenal kebijakan "trickle down economics" (ekonomi menetes ke bawah), yang mengandalkan bahwa pemberian prioritas keuntungan kepada bisnis dan anggota masyarakat yang mempunyai level pendapatan tinggi akan berdampak pada akhirnya pada peningkatan ekonomi masyarakat miskin juga karena adanya peningkatan ekonomi secara lebih luas.¹³ Dalam konteks politik ekonomi semacam ini, kebijakan lebih banyak anti-orang miskin dengan lebih memperhatikan perusahaan-perusahaan besar dan multi-nasional, dan kurang memperhatikan perusahaan-perusahaan menengah dan kecil. Kepada perusahaan-perusahaan besar itu diberikan berbagai macam kemudahan melalui sejumlah kebijakan yang menguntungkan mereka, termasuk penggelontoran pinjaman bank yang sangat besar dengan persyaratan yang mudah. Perusahaan menengah, dan apalagi kecil, sulit sekali mendapatkan pinjaman modal dari bank karena sejumlah persyaratan sulit mereka penuhi.¹⁴ Beberapa kebijakan terhadap petani dan peternak pun, misalnya, lebih menguntungkan pengusaha daripada menguntungkan mereka. Saat krisis ekonomi menjelang dan segera setelah turunnya Suharto, banyak sekali perusahaan yang rontok dan bangkrut. Tapi justru banyak perusahaan kelas menengah dan kecil yang tak terlalu banyak mendapatkan keuntungan dari kebijakan ekonomi pemerintah justru bertahan hidup dan berkembang.

Kondisi di atas tidak terlalu banyak berubah pasca Reformasi. Memang ekonomi Indonesia pada masa Susilo Bambang Yudoyono disebut mengalami peningkatan yang menjanjikan. Model pengentasan kemiskinan yang diterapkan negara masih

¹³ Philippe Aghion, Patrick Bolton, "A Theory of Trickle-Down Growth and Development," *Review of Economic Studies*, 64: 2 (1997), 151-172.

¹⁴ Untuk perkembangan politik ekonomi pada masa Orde Baru, lihat Ian Chalmers dan Vedi Hadiz (ed.), *The Politics of Economic Development in Indonesia: Contending Perspectives*, (London and New York: Taylor & Francis, 1997), 17-23.

bersifat simbolik, seperti pemberian beras untuk rakyat miskin (raskin) dan Bantuan Langsung Tunai (BLT), yang kemudian berubah nama Bantuan Langsung Sementara Masyarakat atau BLSM (sering diplesetkan “balsem”, obat gosok yang rasanya panas dalam waktu singkat). Model semacam ini masih dikembangkan pada masa Joko Widodo, dengan beberapa perbaikan.¹⁵ Namun, kemajuan ekonomi itu lebih merupakan buah dari upaya-upaya kemandirian masyarakat dalam memberdayakan diri mereka secara ekonomi.

D. Teologi Pemiskinan

Adalah fakta bahwa banyak masyarakat religius miskin yang justru menjadikan ayat-ayat kitab suci dan tradisi kenabian sebagai justifikasi bagi pelanggaran kemiskinan. Teks-teks suci memang berbicara tentang kemiskinan dan bagaimana mengembangkan pemikiran dan sikap positif dalam menghadapi kemiskinan, seperti sabar dan tawakkal. Tapi nilai semacam ini tak jarang berkembang pemahaman yang justru mengidealkan kemiskinan dan menjadikan kemiskinan sebagai suatu bentuk religiositas yang ideal. Pemahaman keagamaan semacam ini disebut “Teologi Pemiskinan” (*lāhūt al-tafqīr*), yakni sebuah pemahaman keagamaan yang menjadikan kemiskinan sebagai religiositas ideal bagi seorang atau komunitas beriman. Teologi berdampak pada pelanggaran kemiskinan dan mendorong orang-orang, termasuk yang kaya, memilih menjadi miskin dan tetap menjadi miskin.

Ada idealisasi kemiskinan sebagai cara hidup religious. Ini tampak dari pendapat sejumlah ulama yang mempunyai pengaruh luas dalam masyarakat. Abdullah bin Mas’ud, misalnya, mengatakan: “Seorang hamba tidak sampai kepada hakekat iman sehingga ... kefakiran lebih dia cintai ketimbang kekayaan.”¹⁶ Abu Ali Syaqq bin Ibrahim al-Balkhi, mengatakan: “Takutlah pada orang-orang kaya, karena ketika hatimu terikat pada mereka, dan ketamakanmu pada mereka, maka kamu telah menjadikannya tuhan-tuhan selain Allah.” Ketika beliau ditanya tentang

¹⁵ Saat dituliskannya artikel ini, belum banyak yang bisa dinilai dari kebijakan-kebijakan ekonomi dan pengentasan kemiskinan Jokowi.

¹⁶ Abd al-Wahhab al-Sya’rani, *al-Thabaqat al-Kubra*, Juz 1, Kairo: Maktabah Muhammd al-Baliji al-Kutbi wa Akhihi, 1315, 20.

bagaimana mengetahui kalau seseorang lebih memilih kefakiran ketimbang kekayaan, dia menjawab: "Jika dia takut menjadi kaya, sebagaimana dia takut menjadi fakir, maka dia telah memilih kefakiran."¹⁷ Abu Hamid al-Ghazali (w. 1111) menganggap orang miskin sebagai orang yang secara batiniah lebih salih dibandingkan dengan orang yang kaya. Dalam pandangannya, kemiskinan telah memungkinkan orang miskin terhindar dari bahaya kekayaan dan membuatnya dapat berkonsentrasi pada pencapaian pengetahuan (*ma'rifah*) tentang Allah. Seorang yang miskin yang sabar adalah orang salih, karena menurutnya, sebagaimana dalam sebuah hadits, "Tidak ada orang lebih beriman daripada orang miskin, jika dia bersabar." Ada pula yang memandang kemiskinan sebagai penyakit yang harus dapat ditanggung dengan sabar oleh orang yang terkena penyakit ini (kemiskinan), dan karenanya dia akan mendapatkan pahala. Ini pendapat Ibn al-Jawzī, seorang alim Hanabilah. Karena kesabarannya dalam menanggung penderitaan, sebagaimana sebuah hadits, si miskin ini akan masuk surga 500 tahun lebih dulu dibandingkan dengan orang kaya, karena pentingnya sabar menanggung derita kemiskinan.¹⁸ Saya tidak menyalahkan ulama-ulama yang karena kapasitas spiritual pribadinya memilih tidak menjadi kaya, tetapi ketika pandangan itu diadopsi oleh masyarakat luas dan secara kolektif berdampak luas pada pemiskinan dan kemunduran sebuah peradaban, maka hal ini perlu dipersoalkan.

Lebih lanjut, problem mendasar dari Teologi Pemiskinan adalah penyamaan kekayaan dengan "kehidupan dunia" dan "kemewahan" dalam membaca teks-teks al-Qur'an dan Hadits. Beberapa penggambaran al-Qur'an tentang kehidupan dunia telah dijadikan dasar bagi mulianya hidup yang menjauhinya, yaitu dengan cara hidup miskin. Pertama, adanya perintah agar tidak terpedaya kehidupan dunia, yang dikaitkan dengan pedaya syaitan, dan balasan neraka nanti di akhirat (QS. Fathir 35: 5-6). Kedua, kehidupan dunia digambarkan sebagai "fitnah"

¹⁷ Al-Sya'rani, *al-Thabaqat al-Kubra*, Juz 1, 65.

¹⁸ Ibn al-Jawzi, *Talbis Iblis*, ed. K. 'Alī (Beirut), n.d. 182; dikutip dalam "Faqr", http://www.oxfordislamicstudies.com/article/opr/t236/e1026?_hi=0&_pos=2#match.

(cobaan yang besar) (QS. Al-Taghabun 64: 15). Ketiga, "kesenangan kehidupan dunia" digambarkan untuk orang-orang yang ingkar kepada Allah Sang Mahakasih dan kehidupan akhirat bagi orang-orang yang bertaqwa (QS al-Zukhruf 43: 33-35). Keempat, orang-orang yang menghendaki "kehidupan dunia dan perhiasannya" tidak akan memperoleh apapun di akhirat kecuali neraka (QS. Hud 11: 15-16). Kelima, orang-orang yang "mencintai kehidupan dunia dan meninggalkan kehidupan akhirat" di akhirat nanti wajahnya akan muram karena yakin akan ditimpa azab dan malapetaka yang dahsyat (QS. al-Qiyamah 75: 20-26). Keenam, orang-orang yang "melampaui batas dan mengutamakan kehidupan dunia" akan tinggal nanti di neraka. Ketujuh, kenikmatan kehidupan dunia (*mata' al-hayah al-dunya*) digambarkan sebagai sedikit dibandingkan dengan kenikmatan kehidupan akhirat, dan kehidupan akhirat itu adalah bagi orang beriman dan bertawakkal kepada Tuhan (QS. Al-Taubah 9: 38; al-Nisa' 4: 77; al-Syura 42: 36; Ghafir 39: Thaha 20: 131). Kedelapan, kehidupan dunia digambarkan sebagai "permainan, senda gurau, perhiasan, saling berbangga di antara manusia, dan perlombaan dalam kekayaan dan anak keturunan", dan bahwa kehidupan dunia itu secara simbolik diibaratkan seperti air hujan yang dapat menyuburkan tumbuhan, tapi tumbuhan itu kemudian kering, hancur dan diterbangkan oleh angin. (Q.S. al-Hadid 57: 20; QS. al-Kahf 18: 45). Hal ini dikuatkan dengan hadits-hadits tentang orang miskin penghuni surga. Usamah bin Zaid RA berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda: "Ketika aku berdiri di hadapan pintu surga (ketika Isra' Mi'raj), ternyata kebanyakan orang yang memasukinya adalah orang-orang miskin. Aku juga melihat para pembesar sedang ditahan, kecuali penghuni neraka, di mana mereka diarahkan menuju ke neraka. Ketika aku berdiri di hadapan pintu neraka, ternyata kebanyakan orang yang memasukinya adalah kaum perempuan." (HR. Bukhari, Muslim, dan Ahmad).

Ayat-ayat dan hadits di atas sama sekali tidak mengajarkan tentang idealisasi kemiskinan dan larangan menjadi kaya. Pemahaman ini berjalinkelindan dengan pemahaman teologi fatalistik (*jabbariyah*) yang beranggapan bahwa apa pun yang terjadi pada diri manusia, baik menjadi kaya atau miskin, adalah

takdir Allah sejak zaman azali. Manusia tidak dapat mengubahnya, walau ingin sekali mereka mengubahnya. Yang harus dilakukan adalah bahwa manusia hendaknya sabar menerima takdir-Nya dan tawakkal kepada-Nya, yang karena kesabaran dan tawakkal itulah mereka akan mendapatkan pahala yang besar nanti di Akhirat. Dengan dukungan pemahaman fatalistik semacam ini Teologi Pemiskinan menjadi semakin sempurna.

E. Keniscayaan Aktivisme Sosial Kritis

Aktivisme telah memainkan peranan besar dalam mengakhiri perbudakan, menentang kediktatoran, melindungi pekerja dari eksploitasi, melindungi lingkungan, mempromosikan kesetaraan bagi perempuan, menentang rasisme, menggalang dana bencana, menanggulangi kemiskinan, dan banyak isu lainnya. Sebagaimana dikatakan oleh Brian Martin, "Aktivisme adalah tindakan atas nama suatu alasan, tindakan yang melampaui hal yang konvensional dan rutin... tindakan yang melampaui politik konvensional, yang secara khusus bersifat energetik, bergairah, inovatif, dan berkomitmen."¹⁹ Tindakan itu dapat berupa penulisan di media sosial atau artikel di koran, radio alternatif, pertemuan public, unjuk rasa, atau bahkan puasa (seperti yang dilakukan Gandhi), sedangkan alasannya dapat berupa hak asasi perempuan, oposisi terhadap pabrik, perdamaian dunia, kemiskinan, ketidakadilan. Namun demikian, aktivisme dapat pula digunakan untuk suatu tujuan negatif, seperti menyerang minoritas, mendukung perang, koruptor, atau kebijakan pemerintah yang memiskinkan. Terdapat berbagai macam aktivisme, dari percakapan berhadapan-hadapan langsung sampai dengan protes massif, dari perilaku berkeyakinan sampai dengan perilaku tak bermoral, dari permintaan yang sopan sampai dengan campur tangan yang memaksakan, dan dari protes damai sampai dengan serangan kekerasan. Namun, aktivisme tidaklah niscaya sesuatu yang baik atau buruk, tergantung pada alasan, tindakan, dan penilaian seseorang tentang apa yang bermanfaat. Seseorang

¹⁹ Brian Martin, "Activism, Social and Political," dalam Gary L. Anderson and Kathryn G. Herr (eds.), *Encyclopedia of Activism and Social Justice* (Thousand Oaks, CA: Sage, 2007), pp. 19-27.

dapat saja mengatakan bahwa protes itu sebuah pertahanan yang bernilai terhadap hak asasi kaum miskin, dan orang lain mungkin mengatakan bahwa itu sesuatu itu justru berbahaya bagi mereka. Sedangkan aktivisme sosial, sebagaimana dikatakan Michele Ford, mempunyai pengertian luas yang mencakup aktivis online mandiri, kelompok-kelompok kajian kecil, sampai dengan lembaga non-pemerintah semi-profesional (NGO) dan gerakan massa yang mengadvokasi perubahan dalam berbagai macam isu, dari identitas etnik dan keagamaan sampai kekerasan hak asasi manusia dan lingkungan, dari yang bersifat lokal dan nasional dan transnasional, yang semuanya berorientasi pada perubahan sosial.²⁰

Aktivisme sosial kritis adalah aktivisme berkebaikan dalam berbagai bidang yang berorientasi pada perubahan masyarakat menuju kondisi yang lebih baik, yang dibekali dengan sikap kritis yang reflektif terhadap kelemahan dan kesalahan pemikiran, tindakan dan karya sendiri dan orang lain dalam konteks kasih sayang dan keadilan sosial. Kritis terhadap diri sendiri penting agar peka terhadap ketimpangan sosial di sekitarnya, dan agar tidak beragama secara manipulatif. Kritis terhadap orang lain (termasuk negara) ini bukan dalam rangka kebencian, tetapi justru karena sebagai perwujudan *rahmah* (kasih-sayang) sosial yang membangun. Ini mewujud dalam bentuk komunikasi saling mengingatkan, mengoreksi, mengkritik, dan mengadvokasi dalam konteks kebenaran, kebaikan, dan konsistensi (kesabaran) dalam meningkatkan martabat kemanusiaan. Dalam konteks ini, gerakan protes dan demonstrasi dimungkinkan, jika memang dianggap sebagai jalan terbaik. Di sinilah aspek “kritis” dari bentuk aktivisme sosial ini.²¹

²⁰ Michele Ford, “Social Activism in Southeast Asia: an Introduction,” dalam Michele Ford, *Social Activism in Southeast Asia*, (Oxon, New York: Routledge, 2013), 1.

²¹ Aktivisme sosial juga mencakup isu-isu lingkungan dan kebencanaan, karena semua itu berdampak pada masyarakat. Lihat, Moch Nur Ichwan, “Eko-Teologi Bencana, Aktivisme Sosial, dan Politik Kemaslahatan: Perspektif Islam,” dalam Agus Indiyanto dan Arqom Kuswanjono, *Agama, Budaya, dan Bencana*, Bandung: Mizan, 2012, 19-32.

Secara teologis, aktivisme sosial kritis ini diinspirasi oleh QS. al-'Ashr dan al-Ma'un, yang menggambarkan perbuatan berkebaikan yang berdampak sosial liberatif dan berdasar religiusitas "otentik" (aktivisme sosial kritis) sebagai jalan keluar dari kerugian, kemunduran, kelemahan dan kehancuran umat manusia.²² Tapi iman tak perlu ditunjuk-tunjukkan dan dipamer-pamerkan, cukup diketahui oleh manusia dan Tuhannya; yang penting adalah perbuatan dan karya berkebaikan (*shālihāt*), nyata dan bermanfaat bagi sesama.²³ Islam mempunyai misi sebagai *rahmah li al-'ālamīn* dan penegak keadilan sosial ('adalah) agar kehidupan di dunia ini menjadi lebih baik (*hasanah*). Dalam kerangka ini Islam mempunyai misi membebaskan manusia, siapa pun mereka, dari keburukan-keburukan (*sayyi'ah*) di dunia, serta menjadikan kehidupan di akhirat nanti juga baik, dan membebaskan manusia, yang bersedia hidup dalam bimbingannya, dari keburukan-keburukan neraka. Kemiskinan bukanlah kebaikan di dunia, sebagaimana neraka bukanlah kebaikan di akhirat. Oleh karena itu kemiskinan haruslah diupayakan untuk dihapuskan, karena itu bukan bagian dari kebaikan di dunia. Terkait ini, Islam bukanlah hanya *logos* (kata, kalam), dan *pistis* (iman), tetapi juga *praxis* (perbuatan dan aktivisme yang baik).

Dalam konteks aktivisme sosial, ummat Islam mengembangkan ajaran-ajaran Islam tentang kedermawanan, yakni zakat, infaq, shadaqah, dan wakaf (*waqf*). Dari kata *zakka* (menyucikan), zakat memang ajaran yang terkait dengan pembersihan atau penyucian harta dari bagian yang menjadi hak orang lain, yakni hak fuqara' (orang-orang fakir), masakin (orang-

²² "Demi Masa. Sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan-kebaikan (*shālihāt*), dan saling menasihati dengan kebenaran, dan saling menasihati dengan kesabaran." (QS. al-'Ashr 103: 1-3). Shalihāt di sini adalah kebaikan dalam pengertian luas, baik religius maupun non-religius (sekular). "Tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Itulah orang yang menghardik anak yatim, dan tidak menganjurkan memberi makan fakir miskin. Maka celakalah bagi orang yang shalat, yang lalai akan shalatnya, orang yang berbuat agar dilihat orang, dan enggan (menolong dengan) hal-hal yang berguna." (QS. al-Ma'un 107: 1-7)

²³ Dalam al-Qur'an, banyak sekali ayat yang mengaitkan iman dan perbuatan berkebaikan dalam sebuah kontinum; iman mesti berujung pada perbuatan baik.

orang miskin), *gharimin* (yang terbelit hutang), *sabilillah* (jalan Allah), *riqab* (pembebasan budak, *human trafficking*), Ibn Sabil (orang dalam perjalanan dan kehabisan bekal), dan *amilin* (pengelola zakat).²⁴ Masdar F. Mas'udi, misalnya, melakukan reinterpretasi terhadap tujuh kelompok (*asnaf*) yang berhak mendapatkan zakat. Sebelumnya perlu di kemukakan bahwa menurut Masdar pajak itu dapat menjadi zakat mal jika diniatkan demikian. *Fuqara'-Masakin* adalah fakir-miskin sebagaimana yang selama ini dipahami; *amilin* (aparapajak dan pemerintah), *mu'allafah qulubuhum* (rehabilitasi sosial), *riqab* (kaum tertindas), *gharimin* (yang terbelit hutang), *sabilillah* (kepentingan umum), dan *ibn sabil* (tunawisma dan pengungsi).²⁵

Yusuf al-Qaradawi menyebut zakat ini sebagai "jaminan sosial" (*dhamān ijtīmā'ī*), yang bukan hanya bantuan individual yang sukarela, tetapi rutin dan tertib, karena merupakan bagian dari rukun Islam, yang diberikan bukan hanya untuk Muslim tapi juga non-Muslim yang miskin.²⁶ Jika zakat terikat dengan tujuh kelompok itu, maka *infaq* dan *shadaqah* dapat diberikan kepada siapa saja, dan secara keagamaan bukan untuk menyucikan harta, tetapi menambah pahala di akhirat. Wakaf adalah harta yang dilepaskan kepemilikannya dan diperuntukkan bagi kepentingan umat, seperti tanah untuk masjid, pesantren, sekolah atau madrasah, atau untuk hal-hal produktif, seperti untuk kompleks pertokoan atau hotel yang sewanya dikelola untuk kepentingan umat. Bahkan ada pula "wakaf uang" (*waqf al-nuqūd*), yaitu uang yang diwakafkan tidak boleh berkurang, tapi boleh bertambah, karena dikembangkan melalui usaha bagi hasil, disimpan sebagai reksadana, atau hal halal lainnya dan manfaatnya dapat diperuntukkan bagi kepentingan umat.

²⁴ "Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Mahatahu lagi Mahabijak." (At-Taubah: 60).

²⁵ Masdar F. Mas'udi, *Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: Mizan, 2005, 111-27.

²⁶ Yusuf al-Qaradawi, *Musykilah al-Faqr wa Kayfa 'ālahā al-Islām*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985, 105.

Telah banyak muncul gerakan aktivisme filantropis dalam bentuk pengelolaan zakat, infaq, dan shadaqah, wakaf, baik yang berbasis negara, seperti Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amin Zakat (BAZ), serta Badan Wakaf Indonesia (BWI) di level, nasional, provinsi, dan kabupaten/kota, maupun berbasis masyarakat atau "swasta", seperti Dompot Dhu'afa', Rumah Zakat, LAZMU (Lembaga Amil Zakat Muhammadiyah), dan LAZNU (Lembaga Amil Zakat Nahdlatul Ulama), dan sebagainya. Begitu pula muncul gerakan-gerakan yang bergerak dalam bidang tanggap bencana, seperti MERC, ACT, PKPU, dan inisiatif-inisiatif masyarakat baik yang spontan maupun yang terencana dalam penggalangan dana penanggulangan bencana, haruslah dilihat sebagai pengejawantahan dari kepedulian Islam dalam mengentaskan manusia dari kemiskinan.²⁷ Itu semua merupakan bagian dari institusionalisasi dan pengimplementasian ajaran Islam tentang pemberdayaan, pembebasan dan pemerdekaan masyarakat miskin, lemah dan terlemahkan.

Aktivisme sosial kritis juga diharapkan dapat mengeliminasi budaya pemiskinan, politik ekonomi pemiskinan, teologi pemiskinan dan hal-hal lain yang menyebabkan kemiskinan. Aktivisme dapat melalui berbagai jalur, dari media sosial internet sampai dengan turun ke lapangan. Aktivisme *online* melalui media sosial telah terbukti mampu menolong banyak orang, seperti koin untuk Prita, walau tentu itu tak dapat dilepaskan dari aktivisme *off-line*. Aktivisme social pun dapat bersifat personal, seperti menulis surat kepada penentu kebijakan sampai pada tindakan kolektif, baik secara aksidental maupun berkelanjutan, seperti

²⁷ Tentang gerakan filantropi Islam di Indonesia, baca Hilman Latief, *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar, dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: Ombak, 2013; Hilman Latief, "Islam and Humanitarian Affairs: The Middle Class and New Patterns of Social Activism," in Kees van Dijk and Jajat Burhanuddin (eds.), *Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations* (Amsterdam: Amsterdam University Press-ICAS, 2012), 173-193; Amelia Fauzia, *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, (Leiden, Boston: Brill, 2013). Dalam disertasi, saya menulis dua bab tentang politik pembaruan filantropi di Indonesia. Moch Nur Ichwan, "Official Reform of Islam: State Islam and the Ministry of Religious Affairs in Contemporary Indonesia, 1966-2004," disertasi tidak diterbitkan, Tilburg University, 2006.

Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil (*Civil Society Organizations*) atau Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM/NGO).²⁸

Jika kita perhatikan secara mendalam, peningkatan ekonomi dalam satu dekade terakhir sebagian besar justru disebabkan karena munculnya aktivisme kewirausahaan masyarakat sendiri di dalam mengembangkan usaha ekonomi dalam berbagai bidang. *Gerakan ekonomi dari bawah* ini adalah akumulasi dari krisis ekonomi berkepanjangan. Masyarakat tak dapat berharap banyak kepada negara, maka mereka bergerak memberdayakan diri. Banyak sekali bidang-bidang bisnis baru yang sebelumnya belum terambah. Ada yang diinspirasi secara lokal, namun tak sedikit juga yang diinspirasi oleh peluang-peluang bisnis global, seperti bisnis kebab. Industri kreatif dan bisnis online juga berkembang pesat. Beberapa di antara mereka berkembang menjadi bisnis yang menyebar ke berbagai daerah melalui waralaba. Itu banyak muncul justru di kalangan pengusaha kecil dan menengah, dan tak sedikit di antara mereka bisnis berbasis iman (*faith-based enterprise*). Dan yang menarik, perkembangan ini didorong pula oleh aktivisme sosial—dalam pengertian luas—dalam bidang ekonomi dalam bentuk kesediaan untuk berbagi informasi, pengetahuan dan keahlian, tolong-menolong, dan pengembangan jejaring.

Haruslah diakui bahwa upaya-upaya pengentasan kemiskinan ini di Indonesia dan di dunia Muslim lainnya masih bersifat sporadik. Untuk dampak yang lebih luas, diperlukan langkah-langkah yang lebih sistematis, bersinergi, transparan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan interdisipliner-integratif dalam pemberantasan kemiskinan ini. Upaya ini mesti melibatkan banyak pihak yang *committed*, baik itu individu, komunitas, Organisasi-organisasi Masyarakat Sipil Muslim, ilmuwan dan praktisi, dan tentu saja negara yang punya kewajiban memakmurkan rakyatnya.

²⁸ Tentang peran Organisasi Masyarakat Sipil dalam penanggulangan kemiskinan dalam konteks masyarakat Muslim di Indonesia dan Mesir, lihat Hilman Latief, "Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah and Politics in Indonesia," disertasi Universitas Utrecht, 2012; Moustafa Y. Khalil, "The Contribution of Islamic-Based CSOs to Poverty Reduction in Egypt: The Mechanisms, the Politics and the Lessons," disertasi University of Manchester, 2014.

Upaya-upaya itu perlu direncanakan dengan baik dengan kacamata keilmuan dan diimplementasikan secara sistematis dan transparan. Ilmu pengetahuan tidak lagi dapat bekerja sendiri-sendiri, tetapi harus saling menyapa (interdisipliner) dan terintegrasi untuk melakukan mencapai yang sama: memberantas kemiskinan. Ini harus dibedakan dari rekayasa sosial (*social engeneering*) yang positivistik dan dalam penerapannya menjadikan aspek-aspek non-ekonomi, seperti kebudayaan dan politik, hanya untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, serta mengabaikan aspek peri-kemanusiaan dan spiritualitas.²⁹ Ini tidak harus, bahkan tidak dapat, dipahami sebagai hanya ada satu strategi tunggal yang bersifat gigantik (raksasa), yang satu-untuk-semua, tetapi dapat merupakan berbagai strategi yang dikontekstualisasikan dengan kondisi nusantara yang terdiri dari pulau-pulau dan plural secara kebudayaan, etnis, ras, agama dan keyakinan. Bagaimana pun juga rahmat keislaman bukan hanya untuk orang Islam, tapi kepada seluruh ummat manusia.

F. Penutup

Semua agama, termasuk Islam, lahir sebagai solusi bagi problem sosial di sekitarnya. Islam tidak menghendaki ketimpangan sosial (*social inequality*) dalam semua bidang, termasuk ekonomi. Islam tidaklah menghendaki manusia hidup miskin, lemah, dan terlemahkan. Oleh karena itu, agama sangat menghargai kerja keras, dan melarang malas, berpangku tangan, dan bertumpu pada belas kasihan orang lain. Seringkali, secara internal, pemahaman teologis tertentu yang memiskinkan yang menyebabkan mereka sulit keluar dari lingkaran dan spiral kemiskinan-pemiskinan. Mereka yang terjebak dalam pemahaman teologis semacam ini justru menganggap kemiskinan sebagai bagian dari kehidupan religius yang ideal, agar mudah menggapai surga. Tetapi pemahaman teologis adalah satu hal, yang bisa saja tidak berkembang jika tidak disemai dan dirawat oleh faktor-faktor eksternal, seperti, faktor-faktor budaya, sosial, dan politik.

²⁹ Tentang kritik terhadap rekayasa sosial, lihat Ignas Kleden, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, (Jakarta: LP3ES, 99-100).

Masalahnya, faktor-faktor eksternal ini seringkali sangat kuat mendesak kehidupan masyarakat Muslim, sehingga pemahaman teologis yang memiskinkan itu justru menjadi makin subur.

Oleh karena itu, setidaknya ada tiga hal yang mesti dikembangkan ummat Islam. Pertama, secara intelektual, ummat Islam niscaya mengembangkan teologi sosial kritis baru yang memberdayakan kaum miskin dan membebaskan mereka dari belenggu kemiskinan, serta sekaligus memampukan mereka menghadap tantangan-tantangan baru globalisasi.³⁰ Globalisasi adalah tantangan berat yang dapat menggerus tanpa ampun kaum *du'afa* dan *mustadh'afun*. Upaya pemberantasan kemiskinan dapat termentahkan jika tidak diikuti dengan upaya memampukan dalam menghadapi tantangan-tantangan baru yang bersifat mondial. Kedua, ummat Islam dituntut mengembangkan aktivisme sosial kritis berkebijakan (*shālihāt*) di berbagai bidang, terutama dalam memberantas kemiskinan. Ummat beriman, baik kaya maupun miskin, sama-sama diseru untuk melakukan aktivisme sosial kritis dalam mengentaskan, membebaskan dan memberdayakan diri mereka sendiri dan orang lain dari jerat kemiskinan. Ketiga, ummat Islam perlu melakukan langkah-langkah yang lebih sistematis, bersinergi, transparan dan memanfaatkan ilmu pengetahuan interdisipliner-integratif dalam pemberantasan kemiskinan ini, dengan tidak mengabaikan aspek peri-kemanusiaan dan spiritualitas.

Dalam konteks yang lebih luas, kemiskinan ekonomi telah berdampak pula pada kemiskinan peradaban. Islam mengalami kemunduran peradaban sejak runtuhnya Baghdad (1258) dan terlebih lagi setelah runtuhnya Andalusia (1492), dan diikuti oleh kolonisasi negeri-negeri Muslim, yang itu juga berarti kemunduran ummat Islam secara ekonomi. Ilmu pengetahuan dan teknologi dengan segala Riset-riset dan pengembangannya tak dapat dikembangkan tanpa adanya biaya yang sangat besar.

³⁰ Perlunya teologi sosial baru semacam ini juga ditekankan oleh Moeslim Abdurrahman, "Dibutuhkan Teologi Sosial Baru," dalam bukunya *Suara Tuhan, Suara Pemerdakaan: Menuju Demokrasi dan Kesadaran Bernegara*, Yogyakarta: Kanisius, 2009, 185-191.

Telah terbukti bahwa negara-negara yang tidak mengalokasikan dana besar dalam bidang pendidikan dan penelitian mundur dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tidak cukup umat Islam hanya mengklaim bahwa semua temuan ilmu pengetahuan telah ada dalam al-Qur'an, karena seratus kali pun klaim semacam itu tidak akan membuktikan bahwa umat Islam telah menguasai ilmu pengetahuan yang diklaimkan itu. Pengembangan peradaban Islam tak dapat dibayangkan tanpa adanya sumberdaya ekonomi yang besar, di samping tentu saja sumberdaya intelektual dan saintifik yang luar biasa juga. Umat Islam tidak akan dapat mengembangkan peradaban dengan baik, jika masih harus bergelut dengan masalah kemiskinan, apalagi ditambah dengan konflik berkepanjangan di negeri-negeri Muslim. Pemberantasan kemiskinan adalah bagian integral, dan bahkan kunci utama, dari kebangkitan sebuah peradaban—peradaban Islam. *'Ala kulli hal*, aktivisme sosial kritis yang digambarkan di atas mungkin tampak sebagai utopia. Tapi memang kita memerlukan utopia-utopia untuk dapat berupaya sungguh-sungguh mencapai tujuan yang lebih baik, dan dengan cara-cara terbaik—bukan menghalalkan segala cara—di masa sekarang dan yang akan datang.

Wa-llāhu a'lam bi al-shawāb.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd al-Baqi, Muhammad Fuad, *Mu'jam Mufahras li Alfaz al-Qur'an al-Karim*. Kairo: Dar al-Hadits, 2007.
- Abdulai, Abdul-Mumin dan Elmira Shamshiry, *Linking Sustainable Livelihoods to Natural Resources and Governance, The Scale of Poverty in the Muslim World*, Singapore etc.: Springer, 2014.
- Moeslim Abdurrahman, "Dibutuhkan Teologi Sosial Baru," dalam *Suara Tuhan, Suara Pemerdekaan: Menuju Demokrasi dan Kesadaran Bernegara*, Yogyakarta: Kanisius, 2009, 185-191.

- Aghion, Philippe dan Patrick Bolton, "A Theory of Trickle-Down Growth and Development," *Review of Economic Studies*, 64: 2 (1997), 151-172.
- Chalmers, Ian dan Vedi Hadiz (ed.), *The Politics of Economic Development in Indonesia: Contending Perspectives*, London and New York: Taylor & Francis, 1997.
- Fauzia, Amelia, *Faith and the State: A History of Islamic Philanthropy in Indonesia*, Leiden, Boston: Brill, 2013.
- Gianotti, Timothy J., "The Test of Poverty: Qur'anic Perspectives," dalam Peter Ochs, William Stacy Johnson (ed.), *Crisis, Call, and Leadership in the Abrahamic Traditions*, New York: Palgrave Macmillan, 2009, 123-37.
- Glock, C.Y. dan R. Stark, *Religion and Society in Tension*, San Francisco: Rand McNally, 1965.
- Güner, Osman, "Poverty in Traditional Islamic Thought: Is it Virtue or Captivity?" *Studies in Islam and the Middle East [SIME]*, Vol. 2, no. 1, (2005).
- Ichwan, Moch Nur, "Eko-Teologi Bencana, Aktivisme Sosial, dan Politik Kemaslahatan: Perspektif Islam," dalam Agus Indiyanto dan Arqom Kuswanjono (Ed), *Agama, Budaya, dan Bencana*, Bandung: Mizan, 2012, 19-32.
- Ichwan, Moch Nur, "Official Reform of Islam: State Islam and the Ministry of Religious Affairs in Contemporary Indonesia, 1966-2004," disertasi tidak diterbitkan, Tilburg University, 2006.
- Ford, Michele, "Social Activism in Southeast Asia: an Introduction," in Michele Ford, *Social Activism in Southeast Asia*, Oxon, New York: Routledge, 2013.
- Jones, Pim, *Pengantar Teori-teori Sosial*, terj. Achmad Fedyani Saifuddin, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2010, 8-11.
- Keister, Lisa A., "Conservative Protestants and Wealth: How Religion Perpetuates Asset Poverty," *American Journal of Sociology*, Vol. 113, No. 5 (March 2008), pp. 1237-1271.
- Khalil, Moustafa Y., "The Contribution of Islamic-Based CSOs to Poverty Reduction in Egypt: The Mechanisms, the Politics

- and the Lessons," disertasi tidak diterbitkan, University of Manchester, 2014.
- Kleden, Ignas, *Sikap Ilmiah dan Kritik Kebudayaan*, (Jakarta: LP3ES, 99-100.
- Latief, Hilman, "Islam and Humanitarian Affairs: The Middle Class and New Patterns of Social Activism," in Kees van Dijk and Jajat Burhanuddin (eds.), *Islam in Indonesia: Contrasting Images and Interpretations* (Amsterdam: Amsterdam University Press-ICAS, 2012), 173-193.
- Latief, Hilman, "Islamic Charities and Social Activism: Welfare, Dakwah and Politics in Indonesia," disertasi Universitas Utrecht, 2012.
- Latief, Hilman, *Politik Filantropi Islam di Indonesia: Negara, Pasar, dan Masyarakat Sipil*, Yogyakarta: Ombak, 2013.
- Martin, Brian, "Activism, Social and Political," dalam Gary L. Anderson and Kathryn G. Herr (eds.), *Encyclopedia of Activism and Social Justice* (Thousand Oaks, CA: Sage, 2007), pp. 19-27.
- Mas'udi, Masdar F., *Pajak itu Zakat: Uang Allah untuk Kemaslahatan Rakyat*, Bandung: Mizan, 2005.
- Al-Qaradawi, Yusuf, *Musykilah al-Faqr wa Kayfa 'alajahā al-Islām*, Beirut: Muassasah al-Risalah, 1985.
- Sharma, Arvind, "Hinduism and Poverty," dalam William A. Galston and Peter H. Hoffenberg (ed.), *Poverty and Morality, Religious and Secular Perspectives*, Cambridge: Cambridge University Press, 2010, pp. 160-179.
- Al-Sya'rani, Abd al-Wahhab, *al-Thabaqat al-Kubra*, Juz 1, Kairo: Maktabah Muhamamd al-Baliji al-Kutbi wa Akhiri, 1315 H.

Agama, Filsafat, & Kemiskinan

Program Studi Agama dan Filsafat Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta kali ini mengangkat tema agama, filsafat dan kemiskinan, atau tepatnya tanggungjawab agama dan filsafat dalam pengentasan kemiskinan. Buku ini menyuguhkan pembahasan yang cukup komprehensif, mulai dari aspek normative agama, dan filsafat sampai rekomendasi praksis untuk pengentasan kemiskinan di Indonesia. Bahasan dalam buku ini adalah anti-tesis terhadap kajian agama yang lemah menghadapi kemiskinan dan filsafat yang terlalu abstrak mendekati kemiskinan. Kajian-kajian dalam buku ini berdimensi progresif-liberatif dalam berhadapan dengan fakta kemiskinan, dan mencoba menjawabnya dari perspektif agama dan filsafat. [hbk]



Program Studi Agama dan Filsafat
Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

ISBN-978-602-72084-38



9 786027 208438